

Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

¹ADHI IMAN SULAIMAN, ² DJUARA P LUBIS,
³ DJOKO SUSANTO, ⁴ NINUK PURNANINGSIH

¹FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah

^{2,3,4} Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Darmaga Bogor, Jawa Barat

email: ¹ adhi_iman@yahoo.com, ² djuaralubis@gmail.com, ³ pskmp@ipb.ac.id, ⁴ kmpipb@yahoo.com

Abstract. Stakeholders are the main actors of development that determine process, result implementation and evaluation of Development Planning Consultation Forum (Musrenbang). This article was aimed to analyze the characteristics of stakeholder relations, aspirations and access to information media with the intensity of stakeholder communication in Musrenbang at the village and urban vilage level. The study used the sequential mixed methods of qualitative with descriptive analysis and quantitative of explanatory survey methods with Pearson correlational analysis. Quantitative data were collected through questionnaires with sampling gradually began by cluster sampling, Solvin formula and then stratified sampling. Qualitative data were collected through literature review, direct observation, analysis of documents, and interviews. The results showed: the characteristic of stakeholders, aspirations, and access to information media have significant correlation with the intensity of stakeholder communication in Musrenbang at the village and urban vilage level.

Keywords: consultation forum, stakeholder, communication intensity

Abstrak. Stakeholder adalah pelaku utama pembangunan yang menentukan dalam proses, pelaksanaan hasil dan evaluasi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tujuan tulisan untuk menganalisis hubungan karakteristik stakeholder, aspirasi dan akses media informasi dengan intensitas komunikasi stakeholder dalam Musrenbang desa/kelurahan. Penelitian menggunakan metode campuran sekuensial (*sequential mixed methods*) yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan metode survei kuantitatif ekplanatif dengan analisis korelasi *Pearson*. Pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner dengan pengambilan sampel klaster, rumus Slovin dan sampel bertingkat. Data kualitatif dikumpulkan melalui studi literatur, obeservasi langsung, analisis dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik stakeholder, aspirasi dan akses media informasi memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi stakeholder dalam Musrenbang desa/kelurahan.

Kata Kunci: musyawarah, stakeholder, intensitas komunikasi

Pendahuluan

Perubahan paradigma pembangunan di era demokratisasi dan otonomi daerah yaitu dari sentralistik menjadi partisipatif memberikan kesempatan lebih terbuka bagi melibatkan masyarakat di tingkat lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Menurut Rinawati (2006), dalam otonomi daerah, pembangunan mengalami pergeseran paradigma, yaitu pembangunan partisipatif yang berlandaskan

pada partisipasi aktif dari lapisan masyarakat terendah (di desa) mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Lubis (2007) menyatakan perubahan paradigma pembangunan di antaranya dari sentralisasi ke otonomi dan desentralisasi, dari model komunikasi pembangunan pola lama yang linier, teknokratik dan *top-down* berubah menjadi relasional (dua arah), konvergen, dialogis dan partisipatif.

Tuntutan dan tantangan demokratisasi

Received: 20 Juni 2015, **Revision:** 11 September 2015, **Accepted:** 23 Desember 2015

Print ISSN: 0215-8175; **Online ISSN:** 2303-2499. Copyright©2015. Published by Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba Terakreditasi SK Kemendikbud, No.040/P/2014, berlaku 18-02-2014 s.d 18-02-2019

dan otonomi daerah dalam pembangunan, direspons dengan adanya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perwujudannya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum yang melibatkan antarpelaku pembangunan yaitu pemangku kepentingan yang disebut *stakeholder*, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional.

Stakeholder melakukan proses komunikasi dalam kegiatan Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi sampai tingkat nasional. Fokus penelitian ini pada kegiatan Musrenbang pada tingkat desa dan kelurahan sebagai forum komunikasi *stakeholder* yang mewakili masyarakat desa/kelurahan untuk mengaspirasikan dan merencanakan program pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan pada tingkat desa dan kelurahan. Menurut Nurcholis *et al.* (2009) Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para *stakeholder* desa/kelurahan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Fungsi komunikasi yang dilakukan *stakeholder* dalam proses pembangunan menjadi sangat penting dan strategis, menurut Sulistyowati *et al.* (2005):

komunikasi diperlukan untuk melakukan pendekatan yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan memecahkan masalahnya sendiri yang semakin kompleks, dan mengondisikan masyarakat bebas berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya.

Peran komunikasi dalam pembuatan kebijakan, akan membuka jalan bagi pelaku (*stakeholder*) untuk mengonstruksi pembangunan yang muncul (Eligio 2011). Menurut Verdeber, yang dikutip Mulyana (2005), komunikasi memiliki dua fungsi umum yaitu fungsi sosial untuk kelangsungan memelihara hubungan bersama, dan fungsi pengambilan keputusan. Menurut Pambudy

(2009), pelaksanaan proses pembangunan, fungsi komunikasi menjadi penting bagi semua *stakeholder* untuk menyadarkan, melakukan pendidikan dan menggerakkan masyarakat. Peran komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan terutama yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat. Purnaningsih (2009) dalam konsep komunikasi sosial digunakan untuk mengorganisasi pemberdayaan dalam pendekatan partisipasi komunitas dan kerjasama antar *stakeholder*.

Terdapat permasalahan dalam Musrenbang dari beberapa hasil penelitian yaitu: fokus perencanaan belum berdasarkan aspirasi, masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga belum memenuhi sikap saling percaya dan terbuka (Purnamasari 2008). Rendahnya rasa memiliki, kesadaran, dan sikap mental *stakeholder* untuk bekerjasama secara sukarela dalam memberikan data, informasi dan kesediaan waktu untuk mengikuti kegiatan Musrenbang (Susanti 2009). Pemahaman masyarakat atas pelaksanaan Musrenbang belum komprehensif dan masih bersifat formalitas kegiatan rutin tahunan (Satries 2011). Lemahnya aspek kemampuan komunikasi pada komunikator, kurang tepatnya realisasi pada pesan berupa program pembangunan dan intensitas umpan balik (Salahuddin 2012).

Berdasarkan hasil studi literatur dan permasalahan yang ditemukan tersebut, peneliti melakukan studi pendahuluan menggunakan metode kualitatif (November 2013 sampai Maret 2014) untuk melakukan pembukaan akses, perijinan, wawancara, dokumentasi dan observasi langsung khususnya pada kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Dengan demikian, tujuan tulisan ini untuk menganalisis hubungan karakteristik stakeholder, aspirasi dan akses media informasi dengan intensitas komunikasi *stakeholder* dalam Musrenbang desa/kelurahan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial (*sequential mixed methods*), yaitu menggabungkan penemuan yang diperoleh mulai dari penelitian kualitatif terlebih dahulu, kemudian penelitian kuantitatif, ataupun sebaliknya, untuk saling melengkapi, memperluas serta mempertajam hasil penelitian (Creswell 2009).

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner, kemudian data ordinal ditransformasi menjadi

data interval dengan *Method of Successive Interval* (MSI). Penelitian dilakukan di empat lokasi yaitu Desa Balokang dan Kelurahan Mekarsari di Kecamatan Banjar, Desa Rejasari dan Kelurahan Muktisari di Kecamatan Langensari, Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Penentuan sampel dengan sampling kluster, ditentukan empat lokasi penelitian dengan populasi 200 *stakeholder* sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan, kemudian menentukan jumlah sampel dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, pengambilan sampel bertingkat secara *proporsional random sampling*, hasilnya didapatkan 133 responden. Penelitian menggunakan analisis korelasi *Pearson* dengan SPSS 19.0.

Karakteristik individu dalam tulisan ini adalah *stakeholder* sebagai peserta dalam proses Musrenbang desa/kelurahan, menurut Lionberger dan Gwin (1982):

faktor-faktor atau peubah-peubah penting dalam mengkaji masyarakat adalah peubah personal seperti umur, pendidikan, dan karakter psikologis. Peubah-peubah tersebut merupakan karakteristik yang melekat pada diri individu masyarakat.

Oktarina *et al.* (2008) menyatakan,

karakteristik individu adalah sifat atau ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang, yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan lingkungannya.

Karakteristik *stakeholder* dalam penelitian, yaitu umur, pendidikan formal, pengalaman berorganisasi dan pengalaman mengikuti Musrenbang desa/kelurahan, serta motif mengikuti Musrenbang desa/kelurahan.

Daerah pedesaan lebih memiliki karakteristik yang mendukung hubungan kepercayaan sebagai modal sosial untuk mendukung tindakan kolektif pada masyarakat (Beard 2007). Nasution *et al.* (2014) menyatakan modal sosial memiliki efek positif pada kesejahteraan di pedesaan.

Menurut Fiisabiilillah *et al.* (2014),

modal sosial adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kerjasama dengan interaksi, kesamaan nilai dan budaya, jaringan, kepercayaan, solidaritas dan hubungan timbal balik.

Aspirasi *stakeholder* dalam Musrenbang desa/kelurahan yaitu berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan dari masyarakat, dan kepentingan organisasi, aspirasi yang berdasarkan program pembangunan

yang belum dilaksanakan, anggaran yang dibutuhkan dan aspirasi dari hasil Musrenbang dusun/lingkungan, serta penolakan terhadap aspirasi yang mementingkan kelompok tertentu.

Menurut Purwatiningsih (2012),

pentingnya pesan atau aspirasi yang disampaikan indikasinya yaitu: (1) Semakin mudah komunikasi memahami pesan komunikasi akan semakin cepat pula pesan tersebut mendapat umpan balik dari masyarakat. (2) Pesan yang disampaikan komunikator yang tingkat kredibilitasnya tinggi akan lebih banyak memberi pengaruh kepada perubahan sikap dalam penerima pesan. (3) Pesan informasi yang menarik adalah pesan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus dengan cara bagaimana memperoleh kebutuhan tersebut. (4) Komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan sesuai dengan pengetahuan dan lingkup pengalaman komunikasi.

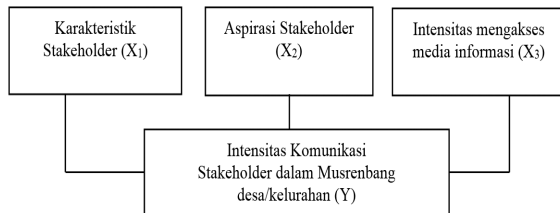
Media informasi dapat mendukung proses Musrenbang supaya transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga Musrenbang dapat diketahui dan menjadi milik bersama yaitu pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat. Media informasi dalam Musrenbang dapat berupa surat edaran dari pemerintah desa/kelurahan, papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, spanduk dan baliho yang dipasang di tempat umum, radio dan koran lokal, serta media internet berupa *website* Bappeda.

Menurut Satries (2011) pemerintah daerah dapat memberikan informasi dan melakukan sosialisasi seluas-luasnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang kepada masyarakat secara umum dan *stakeholder* sebagai perwakilan masyarakat. Informasi dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media yang dimiliki Pemda seperti *website*, buletin, atau turun langsung menemui masyarakat umum. Selain itu, pihak pemerintah daerah juga dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal sosialisasi seperti melalui surat kabar ataupun radio lokal. Leuwis (2009) menyatakan informasi melalui media komunikasi yang saling mendukung diantaranya media massa konvensional seperti jurnal, brosur dan buku serta media teknologi informasi seperti internet.

Komunikasi *stakeholder* adalah proses pertukaran pesan atau aspirasi dari para pelaku pembangunan untuk memengaruhi dan membuat keputusan. Menurut Sumarto (2004) pembangunan sebagai proses komunikasi dan aksi tindakan yang terencana

untuk lebih mensejahterakan kehidupan, tidak lepas dari peran aktor pembangunan itu sendiri.

Aktor pembangunan yang dimaksud adalah para pemangku kepentingan yang beraspirasi, mengakomodasi, bernegosiasi, melakukan lobi dan sosialisasi, membuat perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat kerangka pemikiran pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Stakeholder yang melakukan komunikasi dalam Musrenbang desa/kelurahan untuk merumuskan dan menghasilkan kesepakatan program pembangunan adalah unsur staf pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat seperti tokoh agama (ulama/ustadz), tokoh pendidikan (guru) dan pelaku seni, perwakilan organisasi masyarakat seperti ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kepala dusun/lingkungan, ketua dan pengurus Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Intensitas komunikasi *stakeholder* akan menentukan partisipasi dalam Musrenbang desa/kelurahan, sehingga menjadi perencanaan pembangunan yang partisipatif. Menurut Susanti (2009) peningkatan partisipasi akan meningkatkan pelaksanaan proses musyawarah perencanaan pembangunan menjadi lebih baik dan akan membentuk siklus tahapan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif.

Intensitas komunikasi stakeholder dalam proses Musrenbang desa/kelurahan

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan sebagai forum komunikasi stakeholder yang mewakili masyarakat di tingkat bawah yaitu untuk membahas, menyusun dan menyepakati hasil musyawarah tingkat Rukun Warga (RW) dan dusun/lingkungan menjadi usulan program pembangunan di tingkat

desa/kelurahan. Stakeholder yang terlibat hadir dan melakukan intensitas komunikasi sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan. Musrenbang dilaksanakan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan mulai dari usulan tingkat desa/kelurahan yang hasilnya akan diusulkan pada kegiatan Musrenbang kecamatan dan Kota Banjar.

Berdasarkan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan identitas responden yang berjumlah 133 stakeholder sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan. Identitas responden jumlah laki-laki 77,44%, hal ini menunjukkan stakeholder sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan jumlah stakeholder dari perempuan. Jenis pekerjaan responden lebih banyak sebagai petani sebesar 35,34% dan wiraswasta sebesar 33,83%.

Status responden terdiri dari kepala dusun, RW, panitia penyelenggara, fasilitator, tokoh masyarakat perangkat desa, perangkat desa/kelurahan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Karang Taruna, PKK dan Posyandu. Khusus pada Musrenbang desa terdapat keterwakilan stakeholder dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Status responden umumnya lebih banyak yang berasal dari tokoh masyarakat sebanyak 28,57% dan sebagai ketua RW sebanyak 12,03%.

Hal penting dari hasil deskripsi identitas responden tersebut di antaranya yaitu kehadiran dan keterwakilan peserta Musrenbang desa/kelurahan masih didominasi oleh laki-laki, profesi petani, buruh tani, dan pedagang. Musrenbang diharapkan dapat menjadi forum *stakeholder* yang dapat mewakili dan mengakomodasi dari berbagai lapisan masyarakat. Menurut Slemp *et al.* (2012) ada keterwakilan dari berbagai komunitas *stakeholder* sangat penting sebagai pengambil keputusan di tingkat lokal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), keterwakilan dan jumlah perempuan menjadi bagian dari penilaian evaluasi penyelenggaraan Musrenbang, prioritas program harus ada penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Menurut

Surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musrenbang di Desa dan Kelurahan, bahwa harus memerhatikan peserta dan delegasi desa/kelurahan dalam Musrenbang di tingkat kecamatan ada keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholder*, minimnya keterwakilan perempuan dalam Musrenbang desa/kelurahan dikarenakan: (1) Peran dan aktivitas kelembagaan di masyarakat masih didominasi oleh laki-laki; (2) Perempuan lebih disibukkan untuk mengurus kegiatan rumah tangga; (3) Perempuan masih kurang berani berpendapat dan berfikir kritis. (3) Keterwakilan perempuan hanya dari unsur Posyandu dan PKK, namun kehadirannya selalu sedikit.

Perempuan belum banyak dilibatkan dalam proses pengumpulan data dan informasi (Suadanya 2011). Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum sepenuhnya diperhatikan oleh perencana pembangunan. Keterwakilan perempuan menjadi hal yang penting untuk dapat mengakomodasi aspirasi, potensi dan program pemberdayaan bagi kaum perempuan (Hubeis 2010).

Karakteristik *stakeholder* sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan dari unsur tokoh masyarakat dan pengurus organisasi umumnya dari kalangan tua usia 46 - \geq 56 tahun (68.42%) yang sudah memiliki pengalaman (3- \geq 4 tahun) berorganisasi di masyarakat (66.17%) dan pengalaman mengikuti Musrenbang desa/kelurahan (57.89%), memiliki tingkat pendidikan SD-SMA (89.47%), motif mengikuti Musrenbang desa/kelurahan untuk kepentingan masyarakat (50.38%), kepentingan organisasi (36.09%) serta menggantikan orang lain (13.53%). Menurut Gustina (2007) ada kecenderungan bahwa semakin tua usia maka peran dalam jaringan untuk derajat keterhubungan (koneksi) dan derajat integrasi akan semakin intensif. Tingkat kesadarannya untuk berpartisipasi dan menempatkan diri dalam jaringan juga sudah cukup baik.

Akan tetapi, kaderisasi terhadap usia muda harus diperhatikan dan banyak diberikan kesempatan lebih luas dalam

proses serta pelaksanaan hasil Musrenbang desa/kelurahan dalam menumbuhkan kepedulian serta tanggung jawab terhadap daerahnya sebagai penerus pembangunan. Menurut Susanti (2009), partisipasi pemikiran dari tokoh pemuda diharapkan melahirkan ide-ide yang baru dan lebih mewarnai dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan. Burchell dan Cook (2011) menyatakan komunikasi dengan menggunakan strategi dialog antar *stakeholder* untuk mempresentasikan diri dan identitas organisasi yang lebih terbuka atau transparan terhadap publik yang terkena dampak kegiatan organisasi.

Pada tahap ini, *stakeholder* melakukan proses komunikasi untuk mengaspirasikan usulan, menyusun dan menyepakati prioritas usulan rencana program pembangunan. Aspirasi tersebut dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat, organisasi, hasil Musrenbang dusun/lingkungan, dan program pembangunan yang belum terlaksanakan. Namun tidak ada musyawarah paripurna untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil kesepakatan usulan program pembangunan dari empat kelompok bidang pembangunan, karena setelah selesai saling membubarkan diri dan tidak ada kegiatan penutupan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan.

Pada Tabel 1 menunjukkan *stakeholder* memiliki intensitas tinggi dalam berkomunikasi pada kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dengan panitia penyelenggara dan pemerintah desa/kelurahan. Hal ini dikarenakan pihak panitia penyelenggara dan pemerintah desa/kelurahan memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan kegiatan Musrenbang dan pelaksanaan hasilnya yaitu realisasi pembangunan di desa/kelurahan. Selanjutnya pihak panitia penyelenggara dan pemerintah desa/kelurahan sering merangkap menjadi fasilitator, ketika fasilitator tidak hadir, membantu fasilitator dan mengganti ketidakaktifan fasilitator dalam musyawarah. Hal tersebut menjadikan intensitas komunikasi *stakeholder* dengan fasilitator berbeda sedikit persentasenya antara katagori tinggi dan rendah khususnya pada pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.

Tingginya intensitas komunikasi *stakeholder* dengan pemerintah desa/kelurahan dan panitia penyelenggara, yang terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD) dan staf pemerintahan desa/kelurahan,

Tabel 1
Intensitas komunikasi stakeholder dalam Musrenbang desa/kelurahan 2014

Berkomunikasi dengan pihak	Katagori	Dalam Musrenbang desa/ kelurahan	
		Jumlah	Persentase (%)
Pemerintah desa/kelurahan	Rendah	35	26.32
	Tinggi	98	73.68
Perwakilan organisasi	Rendah	55	41.35
	Tinggi	78	58.65
Tokoh masyarakat	Rendah	41	40.83
	Tinggi	92	69.17
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Rendah	98	73.68
	Tinggi	35	26.32
Fasilitator	Rendah	64	48.12
	Tinggi	69	51.88
Panitia Penyelenggara	Rendah	28	21.05
	Tinggi	105	78.95

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner

dikarenakan sebagai pihak yang mengetahui serta memahami program pembangunan yang dapat direalisasikan beserta besaran anggaran dan mekanismenya.

Pemerintah desa, khususnya dan BPD mempunyai kewenangan dalam mengalokasikan sumber dana pembangunan yaitu dari swadaya, pendapat asli desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan memiliki kewenangan untuk mengajukan dan mengalokasikan dana pembangunan yang bersumber dari APBD kota dan provinsi. Pemerintah desa/kelurahan memiliki kewenangan, sumber dana dan informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta stakeholder, sehingga harus terjalin hubungan baik, menjaga kepercayaan, kredibilitas serta bekerjasama untuk melakukan pembangunan.

Adams (2014) menyatakan,

mencapai tujuan musyawarah bukan sekadar memerlukan kesepakatan atas argumen yang dianggap sah dan dapat diterima, tetapi ada peningkatan toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda.

Age *et al.* (2012)

mencapai tujuan pembangunan dimulai dari level *grassroot* yaitu melaksanakan pembangunan di pedesaan.

Intensitas komunikasi stakeholder dengan perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan memiliki katagori tinggi. Hal ini dikarenakan stakeholder sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan diantaranya berasal dari tokoh masyarakat dan pengurus

organisasi yang sudah saling mengenal serta memiliki tujuan/kepentingan yang sama, sehingga komunikasi yang terjadi bersifat herisontal atau sejajar, lebih dinamis, terbuka dan akrab. Menurut Slemp *et al.* (2012) stakeholder yang tinggal di pedesaan dan perkotaan sangat memahami bagaimana perspektif dan alternatif untuk pertumbuhan pembangunan serta mampu memberikan dampak bagi kualitas hidup komunitas di daerahnya.

Intensitas *stakeholder* berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang desa/kelurahan termasuk katagori rendah, hal ini dikarenakan OPD hanya sebagai undangan yang mewakili dinas pemerintahan dan kurang aktif melakukan komunikasi untuk memberikan informasi data penting dan saran tentang rencana program pembangunan. Padahal OPD memiliki data dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap dinas pemerintah tentang program pembangunan yang penting untuk diinformasikan dan dihubungkan dengan usulan pada Musrenbang desa/kelurahan. Menurut Susanti (2009), masih terdapat pelaku pembangunan yang kurang memiliki kerjasama secara sukarela dan memberikan informasi. Koswara (2010) menyatakan, masih ada ketidakselarasan perencanaan program pembangunan dan dana anggaran.

Hubungan Karakteristik Stakeholder dengan Intensitas Komunikasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

Karakteristik *stakeholder* dalam penelitian ini meliputi aspek usia, pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman

mengikuti Musrenbang desa/kelurahan serta motif mengikuti Musrenbang desa/kelurahan. Pentingnya menganalisis hubungan karakteristik *stakeholder* sebagaimana menurut Schmeer (1999) bahwa *stakeholder* memiliki pengetahuan, kepentingan, dan kekuasaan untuk berinteraksi yang berkaitan dengan kebijakan, posisi mendukung atau menentang kebijakan tersebut. Hubungan karakteristik *stakeholder* dengan intensitas komunikasi dalam Musrenbang desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hubungan Karakteristik Stakeholder dengan Intensitas Komunikasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

Karakteristik stakeholder	Intensitas Komunikasi dalam Musrenbang desa/kelurahan
Umur	-0.030
Pendidikan formal	0.108
Pengalaman berorganisasi	0.152*
Pengalaman mengikuti Musrenbang desa/kelurahan	0.262*
Motif mengikuti Musrenbang untuk kepentingan organisasi	0.197*
Motif mengikuti Musrenbang untuk kepentingan masyarakat	0.240*

Keterangan : *berhubungan nyata pada $p < 0.05$.
**berhubungan nyata pada $p < 0.10$

Umur dan tingkat pendidikan formal *stakeholder* tidak memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi dalam proses Musrenbang desa/kelurahan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses Musrenbang desa/kelurahan semua *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dalam mengaspirasikan, menanyakan, menolak, menerima dan menyepakati hasil.

Menurut Melkote (1991), komunikasi dalam pembangunan bukan sebagai pesan komunikasi saja melainkan sebagai dialog emansipasi, dan dialog yang egaliter. Menurut Levine *et al.* (2005), banyak diskusi hanya melibatkan warga yang paling memiliki motivasi dan sukarela untuk berpartisipasi melibatkan orang-orang yang lebih baik dalam hal pendapatan, pendidikan, dan statusnya. Namun demikian, semangat untuk musyawarah telah menghapus perbedaan lintas kelas, pekerjaan, jenis kelamin,

kebangsaan, dan budaya. Robertson dan Choi (2012) menyatakan hakekat partisipasi dalam musyawarah adalah berbagi pengetahuan dan informasi secara terbuka serta semua pendapat dianggap sama pentingnya. Menurut Adams (2014) untuk mencapai tujuan musyawarah bukan hanya kesepakatan argumen yang disetujui dan dapat diterima, namun ada peningkatan toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda.

Pengalaman berorganisasi, pengalaman mengikuti Musrenbang desa/kelurahan, motif mengikuti Musrenbang untuk kepentingan organisasi dan masyarakat memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi *stakeholder* dalam proses Musrenbang desa/kelurahan. Berarti, semakin pengalaman berorganisasi, pengalaman mengikuti Musrenbang desa/kelurahan, dan semakin kuat motif mengikuti Musrenbang desa/kelurahan, maka semakin tinggi intensitas komunikasi *stakeholder* dalam proses Musrenbang desa/kelurahan.

Menurut Reed *et al.* (2009), fenomena sosial dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan, identifikasi individu, kelompok dan organisasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Purwatiningsih (2012) menyatakan komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan sesuai dengan pengetahuan dan lingkup pengalaman komunikan. Pesan yang disampaikan komunikator yang tingkat kredibilitasnya tinggi akan lebih banyak memberi pengaruh kepada perubahan sikap dalam penerima pesan. Menurut Gandasari (2014), semakin banyak data, informasi dan pengetahuan yang diberikan maka akan semakin banyak informasi yang didapatkan. Semakin banyak pengetahuan yang dapat dikontribusikan dan dibahas dalam pertemuan dan proses diskusi maka semakin banyak hak yang dapat didiskusikan dan dicarikan solusi atas permasalahan.

Menurut Eversole (2003) pembangunan berhubungan dengan bagaimana *stakeholder* dalam proses pembangunan melakukan interaksi dan mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan. Ma'rif *et al.* (2010) menyatakan kualitas usulan Musrenbang secara *bottom up* dipengaruhi oleh fisik lingkungan dan karakteristik masyarakat di wilayah itu sendiri.

Hubungan Aspirasi Stakeholder dengan Intensitas Komunikasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

Stakeholder sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan yang mewakili kelompok organisasi dan tokoh masyarakat untuk mengaspirasikan usulan program pembangunan dalam Musrenbang desa/kelurahan berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang RW dan dusun/lingkungan. Aspirasi yang diusulkan dan dibahas oleh *stakeholder* dalam Musrenbang desa/kelurahan adalah pada tahapan musyawarah empat kelompok bidang pembangunan yang terdiri dari bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur/fisik. Stakeholder bermusyawarah untuk mengusulkan aspirasi sesuai dengan kepentingan atau hasil Musrenbang tingkat dusun/lingkungannya, kemudian menyusun prioritas usulan program pembangunan untuk disepakati menjadi hasil Musrenbang desa/kelurahan.

Pada Tabel 3 menunjukkan aspirasi yang diusulkan stakeholder berdasarkan kepentingan masyarakat, hasil Musrenbang dusun/lingkungan, anggaran yang dibutuhkan, kepentingan organisasi dan penolakan pada kepentingan kelompok tertentu memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Berarti, semakin penting aspirasi yang diusulkan stakeholder berdasarkan kepentingan masyarakat, hasil Musrenbang dusun/lingkungan, anggaran yang dibutuhkan, kepentingan organisasi dan penolakan pada kepentingan kelompok tertentu, maka semakin tinggi intensitas komunikasi dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi peran stakeholder yang mewakili dari berbagai pihak seperti dari organisasi masyarakat, mewakili tempat domisili, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah desa/kelurahan. Menurut Bungin (2008) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan

(status) seseorang di dalam kelompok (pengurus, aktivis pejabat dan sebagainya dan menyangkut perilaku yang penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Meningkatkan komunikasi dengan menggunakan strategi dialog dari *stakeholder* dan organisasi untuk lebih terbuka dan transparan terhadap publik yang terkena dampak kegiatan organisasi (Burchell dan Cook 2011). Menurut Knobloch *et al.* (2013) musyawarah dilakukan untuk menciptakan demokratisasi yang dialogis dan terbuka pada aspirasi melalui perwakilan yang berusaha untuk dapat memberi atau menerima satu sama lain serta menemukan kesepakatan.

Aspirasi paling penting dari *stakeholder* yaitu berdasarkan hasil Musrenbang dusun/lingkungan yang memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi dalam proses Musrenbang desa/kelurahan. Hal ini dikarenakan Musrenbang desa/kelurahan adalah forum komunikasi stakeholder untuk mengusulkan, membuat prioritas dan menyepakati usulan dari hasil Musrenbang dusun/lingkungan, sehingga perencanaan pembangunan di desa/kelurahan bersifat partisipatif. Menurut Levine *et al.* (2005) istilah dialog dan musyawarah telah menjadi populer dalam komunikasi, terutama mengacu pada model partisipatif. Sufianti *et al.* (2013) menyatakan dalam proses perencanaan terdapat upaya untuk memecahkan permasalahan secara bersama, melalui suatu proses pembelajaran diantara para *stakeholder*. Hal ini dengan proses interaksi, diskusi dan akomodasi aspirasi berkaitan dengan kepentingan, masalah dan strategi yang akan dilakukan

Berdasarkan hasil pengamatan pada Musrenbang desa/kelurahan bulan Januari tahun 2014 dan 2015, kegiatan musyawarah kelompok bidang fisik lebih lama waktu

Tabel 3
Hubungan Aspirasi Stakeholder dengan Intensitas Komunikasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2014

Aspirasi stakeholder yang diusulkan berdasarkan	Intensitas Komunikasi dalam Musrenbang desa/kelurahan
Kepentingan pribadi	-0.050
Program pembangunan yang belum terlaksanakan	0.069
Kepentingan masyarakat	0.150*
Hasil Musrenbang dusun/lingkungan	0.234*
Besaran anggaran yang dibutuhkan	0.177*
Kepentingan organisasi	0.154*
Penolakan pada kepentingan kelompok tertentu	0.127**

Keterangan : *berhubungan nyata pada $p < 0.05$. **berhubungan nyata pada $p < 0.10$

pelaksanaannya, lebih dinamis, dialogis dan terjadi perdebatan. Hasil analisis dokumen dari program pembangunan yang dihasilkan Musrenbang desa/kelurahan 2014/2015 umumnya masih dominan program infrastruktur, termasuk pada program pemerintahan serta sosial budaya juga masih banyak usulan tentang pengadaan peralatan dan sarana operasional, dan pengadaan atau rehabilitasi ruangan yang bersifat fisik/material. Kecuali pada program ekonomi terdapat usulan tentang pengadaan, bantuan dan pemberdayaan bidang pertanian, peternakan dan perikanan, akan tetapi dari segi jumlah pembiayaan anggaran masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bidang infrastruktur.

Hasil wawancara dengan *stakeholder* bahwa pembangunan infrastruktur lebih mudah mengusulkan, dan jelas untuk ukuran, pendanaannya. Bidang lainnya seperti sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan harus mengajukan proposal usulan dengan menunggu informasi dari dinas pemerintah yang sering mendadak serta kurang sosialisasi. Ma'rif *et al.* (2010) menyatakan,

Musrenbang hendaknya dapat menghasilkan sebuah daftar skala prioritas kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan masyarakat dengan disesuaikan dana yang tersedia. Pihak masyarakat harus lebih aktif dalam pelaksanaan Musrenbang dan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai program terkait dengan wilayahnya masing-masing.

Menurut Atkin dan Skitmore (2008)

membutuhkan manajemen *stakeholder* yang dapat mengidentifikasi: (1) Faktor program yang kontekstual, (2) Faktor berbagai persepsi atau pandangan, (3) Faktor pemberdayaan dan (4) Faktor proses hubungan sebagai penentu keberhasilan program kegiatan.

Maka aspirasi *stakeholder* selain berorientasi pada pembangunan material dan infrastuktur juga harus memperhatikan pada pembangunan kemampuan sumber daya masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Menurut Adi (2013) disebut pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan manusia itu sendiri secara berkesinambungan (*sustainable*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 3 bahwa proses perencanaan harus dilakukan secara partisipatif, responsif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan

yang dilaksanakan hendaknya menggunakan paradigma pemberdayaan masyarakat agar terwujud partisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan pada tataran pemerintahan di desa/kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

Hubungan Akses Media Informasi Stakeholder dengan Intensitas Komunikasi

Media informasi dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan sangat penting dalam memberikan informasi, pengetahuan dan motivasi untuk menciptakan kepedulian serta peran aktif dari stakeholder termasuk masyarakat, transparansi, akuntabilitas pemerintah dan menjadi media kontrol publik. Menurut Robertson dan Choi (2012) hakikat partisipasi dalam musyawarah adalah berbagi pengetahuan dan informasi secara terbuka dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia sebelum menghasilkan kesimpulan kolektif. Batta *et al.* (2014) menyatakan media komunikasi memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyebaran fakta, data, dan gambar kepada khalayak.

Tabel 4
Hubungan Akses Media Informasi dengan Intensitas Komunikasi dalam Musrenbang 2014

Akses media informasi	Intensitas Komunikasi Stakeholder
Surat resmi dari desa/kelurahan	0.385*
P a p a n pengumuman di kantor desa/kelurahan	0.284*
Spanduk di tempat umum	0.085
Baliho di tempat umum	0.033
Radio lokal	0.019
Koran Lokal	0.072
Website Bappeda	0.083

Keterangan: *berhubungan nyata pada $p < 0.05$. **hubungan nyata pada $p < 0.10$

Berdasarkan tabel 4, intensitas *stakeholder* mengakses media informasi dari surat undangan resmi dan papan pengumuman di kantor desa/kelurahan yang berisikan agenda kegiatan, format usulan dan rencana program pembangunan dari pemerintah desa/kelurahan memiliki

hubungan nyata dengan intensitas komunikasi dalam proses Musrenbang desa/kelurahan. Berarti semakin tinggi intensitas *stakeholder* mengakses media informasi dari surat resmi dan papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, maka semakin tinggi intensitas komunikasi dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. *Stakeholder* dengan mengakses media informasi akan dapat mengetahui, memahami dan mempersiapkan diri dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, pilihan akses media informasi akan tergantung pada karakteristik personal *stakeholder* dengan pertimbangan ketersediaan media yang bisa diakses, kemampuan mengakses, dan kebutuhan terpenuhinya informasi. Widiastuti (2011) menyatakan karakteristik sosial individu salah satunya mempengaruhi penggunaan saluran komunikasi yang dipilih sebagai sumber informasi.

Berdasarkan hasil pengamatan, media informasi seperti papan pengumuman di kantor desa/kelurahan tidak dimanfaatkan dan ditambah kapasitasnya oleh pemerintah desa/kelurahan untuk mendukung kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Media informasi spanduk dimanfaatkan hanya sebagai dekorasi ruangan Musrenbang dan tidak terpasang dengan media baliho di area publik untuk dapat diakses khalayak masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan Musrenbang. Menurut hasil wawancara dengan *stakeholder*, bahwa media koran dan radio lokal sudah bukan media yang menjadi sumber informasi masyarakat, kemudian media *website* Bappeda hanya menyediakan informasi peraturan hukum dan dokumentasi kegiatan pembangunan, belum dapat dimanfaatkan, diakses untuk mengusulkan aspirasi dan evaluasi hasil Musrenbang, serta masih adanya keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengakses *website*.

Menurut Batta *et al.* (2014) media komunikasi massa termasuk pada dunia maya (*cyberspace*) dan saluran komunikasi tradisional lainnya, memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui penyebaran fakta, data, dan gambar) dalam bentuk apa pun oleh media diinformasikan kepada khalayak. Gandasari (2014) menyatakan jenis media komunikasi memiliki hubungan nyata positif dengan kuantitas informasi dan kepuasan dalam proses kegiatan. Menurut Age *et al.* (2012) mencapai tujuan pembangunan dengan cara memperhatikan proses pembangunan

yang dimulai dari bawah (desa) di antaranya melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia melalui penggunaan saluran media massa yang tepat.

Ketersediaan, pemanfaatan dan kemampuan mengakses media informasi dalam proses pembangunan termasuk dalam mendukung Musrenbang, sangat penting untuk mensosialisasikan, memberikan informasi dan edukasi, menciptakan transparansi, akuntabilitas, evaluasi serta menjadi media kontrol dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya milik pihak tertentu saja seperti pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat langsung dalam Musrenbang, namun masyarakat harus mengetahui, dapat berpartisipasi dan mengontrol. Menurut Barker (2013) upaya meningkatkan strategi komunikasi yang terintegrasi dengan manajemen pengetahuan informasi dan mengidentifikasi lingkungan melalui strategi media yang kreatif.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam agenda pembangunan nasional tentang membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan memiliki arah kebijakan dan strategi, salah satunya adalah penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan, Pasal 3, tentang prinsip-prinsip Musrenbang desa/kelurahan adalah prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalah pemberdayaan (*empowerment*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keberlanjutan (*sustainability*), partisipasi, efisiensi efektif, dan aspiratif.

Simpulan dan Saran

Karakteristik *stakeholder* yang memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi dalam Musrenbang desa/kelurahan adalah pengalaman berorganisasi, pengalaman mengikuti Musrenbang desa/kelurahan, motif mengikuti Musrenbang untuk kepentingan

organisasi dan masyarakat, namun umur dan tingkat pendidikan formal *stakeholder* tidak memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi stakeholder dalam Musrenbang desa/kelurahan.

Aspirasi *stakeholder* memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi dalam Musrenbang desa/kelurahan yaitu aspirasi berdasarkan kepentingan masyarakat, hasil Musrenbang dusun/lingkungan, anggaran yang dibutuhkan, kepentingan organisasi dan penolakan pada kepentingan kelompok tertentu, sedangkan aspirasi yang berdasarkan kepentingan pribadi dan pembangunan yang belum terlaksanakan tidak memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi *stakeholder* dalam Musrenbang desa/kelurahan. Intensitas stakeholder mengakses media informasi dari surat undangan resmi dan papan pengumuman di kantor desa/kelurahan memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi *stakeholder* dalam Musrenbang desa/kelurahan, namun media informasi spanduk dan baliho di tempat umum, koran dan radio lokal serta *website* Bappeda tidak memiliki hubungan nyata dengan intensitas komunikasi *stakeholder* dalam Musrenbang desa/kelurahan.

Saran penelitian secara praktis yaitu lebih memberikan kesempatan pada keterwakilan perempuan dan generasi muda. Aspirasi yang dirumuskan, diusulkan dan dihasilkan tidak dominan pada pembangunan material dan infrastruktur, namun lebih berorientasi pada identifikasi masalah yang dihadapi dan pada potensi sumber daya manusia, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa. Musrenbang desa/kelurahan menyelenggarakan tahapan musyawarah paripurna untuk memresentasikan hasil kesepakatan musyawarah empat kelompok bidang pembangunan. Hal ini supaya stakeholder tidak hanya memiliki kepentingan pada program pembangunan bidangnya sendiri, namun semua usulan bidang pembangunan lainnya dapat diketahui dan menjadi kepedulian bersama.

Bappeda dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan tentang mekanisme Musrenbang desa/kelurahan, perencanaan program, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan desa/kelurahan, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi *stakeholder* dan kualitas aspirasi yang direncanakan dan diusulkan. Bappeda,

pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder dapat memanfaatkan dan mengembangkan berbagai media informasi yang mendukung proses Musrenbang, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) untuk mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik.

Daftar Pustaka

- Adams, B.E. (2014). Reason-Giving In Deliberative Forums. *Journal of Public Deliberation*. Vol. 10, Issue 2, Article 6: 1-27
- Adi, I.R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Barker, R. (2013). Strategic integrated communication: An alternative perspective of integrated marketing communication?. *Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research*. Vol 39 (1):102-121
- Batta, H., Ashong, C., Obot, C. (2014). *Science, Nano-Science and Nano-Technology Content in Nigeria's Elite and Popular Press: Focus on Framing and Socio-political Involvement*. *New Media and Mass Communication*. 31:9-20
- Beard, V.A. (2007). Household Contributions to Community Development in Indonesia. *World Development*. Vol. 35, No. 4: pp. 607-625
- Burchell, J., & Cook, J. (2011). Banging on open doors? Stakeholder dialogue and the challenge of business engagement for UK NGOs. *Environmental Politics*. 20(6): 918-937
- Bungin, B. (2008). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana
- Eligio, E.M.J.E. (2011). Communication imperatives for indigenous peoples' representation in policy making: Lessons from the IPRA (Indigenous Peoples Rights Act) experience. *Telematics and Informatics*. 29 (3):324-334
- Eversole, R. (2003). "Managing the Pitfalls of Participatory Development: Some Insight from Australia". *World Development*. Vol. 31 (5):781-795
- Fiiisabiilillah, D.F., Ftri, Vidayani, F.A., & Hidayah, D. (2014). Peran Modal Sosial dalam Kerjasama Antardaerah Kartamantul. *Mimbar (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*. Vol 31.No.2 : 209-219
- Gustina, A. (2007). *Jaringan Komunikasi dan Peran Perempuan dalam Mempertahankan Budaya Rudat; Studi Pada Masyarakat Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Lampung Selatan*. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Knobloch, K.R., Gastil, J., Reedy, J., & Walsh, K.C. (2013). Did They Deliberate? Applying

- an Evaluative Model of Democratic Deliberation to the Oregon Citizens' Initiative Review. *Journal of Applied Communication Research*. Vol. 41, No. 2: 105-125
- Koswara. (2010). Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Leeuwis, C. (2009). Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan: Berpikir Kembali tentang Penyuluhan Pertanian. Dengan kontribusi dari Anne van den Ban. Sumarah BE, penterjemah. Yogyakarta: Kanisius. Terjemahan: Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension. 2006. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
- Levine, P., Fung, A., & Gastil, J. (2005). Future Directions for Public Deliberation. *Journal of Public Deliberation*. Vol. 1: Iss. 1, Article 3: 1-13
- Lionberger, H.F., Gwin, P.H. (1982). *Communication strategies: A guide for agriculture change agents*. Illinois (US): University of Missouri Columbia Campus
- Lubis D. (2007). Komunikasi Menuju Komunitas Pembelajar. Di dalam: Adiwibowo S, editor. *Ekologi Manusia*. Bogor: FEM IPB
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. *Riptek*. Vol.4, No.11: 53-62
- Melkote, S.R. (1991). *Communication for Development in The Third World: Theory and Practice*. New Delhi, California, London: Sage Publications
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya
- Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2014). Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia. *Mimbar (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*. Vol 31.No.2 : 137-148
- Nurcholis, H., Milwan, T., & Warsono, H. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Oktarina, S., Sumardjo., & Rustiadi, E. (2008). Keefektifan Komunikasi dalam Pengembangan Peran-Peran Kelembagaan Agropolitan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 6(2): 23-42
- Pambudy, R. (2009). Pola Komunikasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. *Prosiding Seminar Nasional. Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat*. Kamis, 19 November 2009. IPB International Convention Center (IPB ICC) Bogor: 67-77.
- Purnamasari, I. (2008). *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Purnaningsih, N. (2009). Pendekatan Komunitas dan Komunikasi Sosial pada Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. IPB Bogor. Vol 3, No 3: 379-394.
- Purwatiningsih, S.D. (2012). Efektivitas Komunikasi Pembangunan pada Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Disertasi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? A typology of Stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*. 90:1933-1949.
- Salahuddin. (2012). Pengaruh Komunikasi Interaksional Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kota Kendari. *Jurnal Stimuli Ilmu Komunikasi*. Edisi 3: 70-78.
- Suadanya, I.W. (2011). *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Barat: Antara Konsep dan Realita*. *Agroteksos* 2(1): 62-70.
- Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, KN., & Firman, T. (2013). Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif. *Mimbar (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*. Vol 29. No. 2: 133-144.
- Sulistiyowati, F., Setyowati, Y., & Wuryantoro, T. (2005). *Komunikasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: APMD Pr.
- Sumarto, H.S. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanti. (2009). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. VI. No. 3: 293-305
- Widiastuti, T. (2011). Peran Teknologi Telepon Selular dalam Perluasan Jaringan Komunikasi Sosial pada Pedesaan Miskin di Indramayu. *Prosiding. Konferensi Nasional Komunikasi "Membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia"*. 9-10 November 2011. Depok: Puskakom Press: 364-285